

KEBUTUHAN MASYARAKAT MISKIN PEDESAAN DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DASAR DI PROVINSI RIAU (STUDI KASUS DI KECAMATAN KUANTAN MUDIK)

Mashuri

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

Email: mashuri@uin-suska.ac.id

Abstract

Village communities change according to changing times. Rural development programs should be adapted to the needs of the poor. The problem of this research is whether the rural development program is in accordance with the needs of the village community?. The purpose of this study was to examine the needs of the rural poor in providing basic infrastructure in Riau Province. This study was carried out in the Kuantan Mudik sub-district which consists of 6 villages, namely Luai Village, Rantau Sialang Village, Kasang Village, Pebaun Hulu Village, Saik Village and Pantai Village. Data was collected using the needs of the rural poor, which consisted of 15 items of basic infrastructure development programs and involved 76 randomly selected respondents. Data were analyzed using descriptive test to determine the highest average value and the lowest average value of all items measured. The results showed that the 15 items of basic infrastructure development programs included in the highest category were the availability of information and communication technology networks (Hp and internet) (mean=4.60), Provision of drinking water (mean=4.57) and road repairs that damaged and perforated (mean=4.56). Meanwhile, the provision of land transportation facilities (mean=3.89), river transportation facilities (mean=3.69) and Village Market Development and Improvement (3.93) were the least needed by rural communities.

Keywords: *Development, Society, Policy, Basic Infrastructure.*

Abstrak

Masyarakat desa berubah sesuai dengan perubahan zaman. Program pembangunan pedesaan sebaiknya disesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat miskin. Permasalahan penelitian ini adalah sudahkah program pembangunan pedesaan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa?. Tujuan penelitian ini adalah meneliti kebutuhan masyarakat miskin pedesaan dalam penyediaan infrastruktur dasar di Provinsi Riau. Kajian ini dijalankan di kecamatan Kuantan Mudik yang terdiri dari 6 desa yaitu Desa Luai, Desa Rantau Sialang, Desa Kasang, Desa Pebaun Hulu, Desa Saik dan Desa Pantai. Data dikumpulkan dengan menggunakan instrumen kebutuhan masyarakat miskin desa yang terdiri dari 15 item program pembangunan infrastruktur dasar dan melibatkan sebanyak 76 responden yang dipilih secara acak. Data dianalisis dengan menggunakan uji deskriptif untuk mengetahui nilai rata-rata paling tinggi dan nilai rata-rata paling rendah dari seluruh item yang diukur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 15 item program pembangunan infrastruktur dasar termasuk dalam kategori paling tinggi adalah Ketersediaan jaringan teknologi informasi dan komunikasi (Hp dan internet) (mean=4,60), Menyediakan air layak minum (mean=4,57) dan Perbaikan jalan yang rusak dan berlubang (mean=4,56). Sedangkan penyediaan sarana transportasi darat (mean=3,89), sarana transportasi sungai (mean=3,69) dan Pembangunan dan Perbaikan Pasar Desa (3,93) adalah yang paling rendah dibutuhkan oleh masyarakat pedesaan.

Kata kunci: pembangunan, masyarakat, kebijakan, infrastruktur dasar.

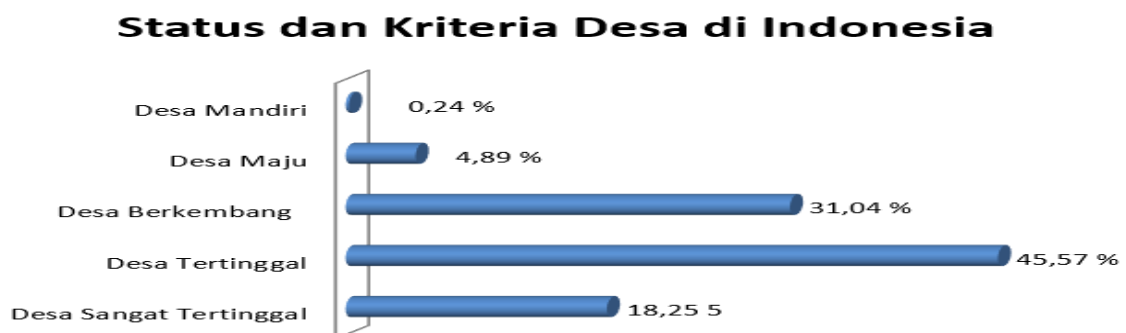
PENDAHULUAN

Pendekatan pembangunan yang terlalu menekankan pertumbuhan ekonomi, telah mengabaikan ketimpangan yang muncul antara kawasan kota dan kampung. Tamam Achda (2004) menjelaskan bahwa strategi pembangunan nasional cenderung diarahkan pada pembangunan kawasan kota yang dilaksanakan secara terencana dan terstruktur, namun dipihak lain pembangunan kawasan luar kota seringkali diserahkan kepada masyarakat itu sendiri untuk mengusahakannya. Pendekatan pembangunan luar bandar dalam pembangunan masyarakat merupakan pengakuan atas ketertinggalan masyarakat luar kota. Akibatnya adalah terjadinya ketidakseimbangan dalam pengelolaan sumber-sumber keuangan, pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan dan tingkat pendapatan.

Kebijakan nasional tentang pembangunan desa terus mengalami perubahan dan perkembangan, hal itu seiring dengan silih bergantinya pemerintahan (kepemimpinan nasional) terjadinya perubahan paradigma kebijakan pembangunan desa, dimana paradigma lama yang bersifat *state centric*; otokratis, *top down*, sentralistik, hirarkhis, sektoral berubah menjadi paradigma baru yang mengandung spirit rekognisi dan subsidiaritas yang bersifat *society centric*; demokratis, *bottom up*, otonomi, kemandirian, lokalitas, partisipatif dan emansipatoris. (Eko, *et, al.* 2014).

Data dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2015, desa di Indonesia berjumlah 74.053. Data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2014 menyebutkan bahwa Desa Sangat Tertinggal sebanyak 13.453 Desa (18,25 %), Desa Tertinggal sebanyak 33.592 Desa (45,57 %), Desa Berkembang sebanyak 22.882 Desa (31,04 %), Desa Maju sebanyak 3.608 Desa (4,89 %) dan Desa Mandiri sebanyak 174 Desa (0,24%).

Diagram 1. Status dan Kriteria Desa di Indonesia



Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2018

Khusus di Provinsi Riau perkembangan setiap desa dapat diketahui Desa Sangat Tertinggal sebanyak 428 Desa (26,7 %), Desa Tertinggal sebanyak 888 Desa (55,4 %), Desa Berkembang sebanyak 278 Desa (17,3 %), Desa Maju hanya 9 Desa (0,56 %) dan belum ada Desa yang masuk kategori Desa Mandiri. Pembangunan desa mempunyai tujuan-tujuan ekonomi, politik dan sosial termasuk meningkatkan penghasilan, menambahkan peluang lapangan kerja dari sektor yang rendah penghasilannya kepada yang lebih menguntungkan. Kawasan pedesaan sudah mulai menjadi fokus pemerintah dalam pembangunan nasional. Senada dengan yang disampaikan (Ilosa *et al*, 2021) bahwa ujung tombak pencapaian pembangunan nasional dimulai dari pembangunan wilayah pedesaan. Hal ini terbukti dengan kebijakan menyediakan dana desa dari pemerintah pusat sejak tahun 2015 dan alokasi dana desa dari pemerintah kabupaten. Walau demikian, perencanaan pembangunan pedesaan bukan tanpa kendala. Diantaranya Program pembangunan sering tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa (Cristian, 2015; Rudiadi *et al*, 2021), Tenaga SDM khususnya perangkat desa yang masih belum terlalu memahami teknis pembuatan laporan pertanggungjawaban (Liando *et al*, 2017). Dalam penelitian ini, permasalahan penelitian adalah sudahkah program pembangunan pedesaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa?. Tujuan penelitian ini adalah meneliti kebutuhan masyarakat miskin pedesaan dalam penyediaan infrastruktur dasar di Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.

Kebijakan Pembangunan Desa

Menurut Thomas R Dye (dalam Mamud, 1995) bahwa kebijakan merupakan segala sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan lahir dari keputusan pemerintah dan keputusan tersebut bersifat mengikat. Keputusan dalam mengambil kebijakan merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh pemerintah, karena pemerintah menurut Widodo (2007) memiliki 2 fungsi yaitu politik (pembuatan kebijakan atau keinginan negara) dan fungsi administratif (pelaksanaan kebijakan). Kebijakan pembangunan merupakan satu proses yang dilalui oleh sebuah negara, rakyat, masyarakat, keluarga dan individu secara terencana menuju kearah yang lebih baik. Pembangunan tidak hanya bersifat kebendaan (fisik/material) saja, bahkan juga melibatkan aspek-aspek kemanusiaan itu sendiri yang mengarah kepada kesejahteraan manusia termasuk hubungan sosial, pendidikan dan agama. Pembangunan masyarakat

desa merupakan program pembangunan untuk masyarakat di kebanyakan negara dunia ketiga dalam meningkatkan taraf hidup rakyatnya.

Konsep Pemberdayaan Masyarakat Desa

Komunitas adalah sekelompok manusia yang mendiami wilayah tertentu dimana seluruh ahlinya berinteraksi satu dengan yang lain, mempunyai pembagian tugas dan status yang jelas, mempunyai kemampuan untuk memberikan aturan terhadap anggotanya. Secara umum pembangunan komunitas merupakan kegiatan pengembangan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terancang dan diarahkan untuk memperluas akses masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial, ekonomi dan kualitas kehidupan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kegiatan pembangunan sebelumnya. Setty (1994) mendefinisikan komunitas sebagai sekumpulan manusia yang bukan saja tinggal di satu wilayah yang mempunyai sama, tetapi juga yang disatukan oleh persamaan dalam cara hidup dan tindakan mereka seperti kesamaan makanan, pakaian dan pekerjaan.

Hillery (1955) telah menyebutkan ada tiga elemen penting dalam pendefinisian komunitas, yaitu kawasan, interaksi sosial dan hubungan atau ikatan bersama. Komunitas boleh dianggap sebagai satu keseluruhan kehidupan sosial di dalam satu lokasi tertentu. Maka, komunitas dapat dirumuskan sebagai kumpulan masyarakat yang tinggal dalam satu lokasi, menjalankan cara hidup sendiri, beraspirasi dan berkeinginan, turut serta dalam pelbagai aktivitas, satu hati, satu ide, satu gerak langkah serta memiliki hubungan yang erat dalam semua aspek kehidupan.

Istilah pembangunan komunitas menurut Batten (1957) awalnya digunakan pada konferensi internasional pada tahun 1948 dengan tema *Cambridge Summer Conference On African Administration*. Hasil dari konferensi tersebut menyatakan bahwa pengembangan komunitas adalah satu upaya yang dibentuk untuk meningkatkan keadaan kehidupan keseluruhan komunitas dengan gerak aktif mereka, dan dengan inisiatif anggota komunitas itu sendiri. Sekiranya inisiatif ini tidak muncul, maka teknik-teknik lain akan digunakan untuk mendorong keinginan serta minat supaya anggota komunitas mengikuti gerakan itu. Ini termasuk mewujudkan pelbagai aktivitas di daerah-daerah, sama ada yang dilaksanakan oleh pemerintah atau badan-badan tidak formal.

Eksistensi komunitas dapat dilihat dengan adanya keseimbangan antara sistem sosial, ekonomi dan lingkungan. Sistem yang seimbang mampu menyediakan satu

kehidupan yang sehat, produktif dan berguna kepada komunitas saat ini dan masa yang akan datang. Kehidupan yang sehat dan produktif inilah yang dijadikan standar eksistensi komunitas. Menurut New Economics Foundation (1998), menyusun 10 indikator komunitas mapan di yaitu; (1) kesehatan, (2) keselamatan, (3) pola hidup, (4) pendidikan, (5) lingkungan, (6) budaya dan pariwisata (7) perumahan, (8) transportasi, (9) kesejahteraan, dan (10) semangat komunitas.

Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Dalam usaha mencapai tujuan pembangunan, yaitu meningkatkan kualitas hidup komunitas yang termasuk di dalamnya komunitas luar bandar, tidak mungkin dapat dicapai apabila dalam proses pembangunan tidak melibatkan satu elemen penting yaitu partisipasi. Tujuan pembangunan hanya bisa dicapai melalui pembangunan secara menyeluruh dan bersinergi antara pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Kepentingan partisipasi orang banyak dalam proyek pembangunan komunitas telah dijelaskan oleh beberapa penulis seperti Mowforth dan Munt (1998) dan Mukerji (1961). Partisipasi yang bersifat demokratik dan sukarela dalam program pembangunan juga menjadi asas pembentukan semangat keyakinan diri sendiri dan akhirnya mampu berdikari (Mukerji 1961). Terdapat tiga sebab utama mengapa partisipasi masyarakat desa penting, yaitu:

- a. Partisipasi adalah salah satu cara mendapatkan gambaran tentang keadaan, kebutuhan dan sikap masyarakat tempatan yang tanpanya program pembangunan kemungkinan akan gagal.
- b. Individu akan lebih komitmen kepada pembangunan sekiranya mereka dilibatkan dalam perancangan dan penyediaannya karena mereka berkontribusi aktif terhadap proyek tersebut.
- c. Di banyak negara, partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan menganggap itu adalah hak asasi yang demokratik.

Adanya rasa memiliki terhadap proyek pembangunan, memungkinkan seseorang itu lebih bertanggungjawab dalam menentukan tercapai atau tidaknya program. Menurut Boyle (1981) partisipasi komunitas mengizinkan mereka menyampaikan masalah yang dihadapi dengan lebih tepat kepada pemangku kepentingan. Franklyn (1985) menyusun empat indikator yang dapat meningkatkan partisipasi komunitas, yaitu: a) Desentralisasi kuasa dalam membuat keputusan dan perancangan sumber kepada pihak bawahan. c)

Pembentukan satu institusi sebagai asas penyertaan dalam membuat keputusan. d) Pengwujudan sifat kepercayaan pada diri sendiri oleh komuniti tempatan dalam pembangunan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di kecamatan Kuantan Mudik yang terdiri dari 6 desa yaitu Desa Luai, Desa Rantau Sialang, Desa Kasang, Desa Pebaun Hulu, Desa Saik dan Desa Pantai. Data dikumpulkan dengan menggunakan instrumen kebutuhan masyarakat miskin desa yang terdiri dari 15 item program pembangunan infrastruktur dasar dan melibatkan sebanyak 76 responden yang dipilih secara acak. Data dianalisis dengan menggunakan uji deskriptif untuk mengetahui nilai rata-rata paling tinggi dan nilai rata-rata paling rendah dari seluruh item yang diukur. Data diinterpretasi dengan membagi kepada tiga kategori yaitu tinggi (3,67-5,0), sedang (2,34-3,66), rendah (1-2,33).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Di bawah ini menunjukkan bahwa laki-laki yang menjadi responden kajian ini sebanyak 40 orang (52,6 %) dan perempuan sebanyak 36 orang (47,4 %). Umur responden paling banyak adalah dibawah 25 tahun (27,6 %) dan kebanyakan responden lulusan SLTA (39,5 %).

Tabel 1. Demografi Responden

Demografi Responden		N	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Laki-laki	40	52,6
	Perempuan	36	47,4
Umur	< 25 th	21	27,6
	25 – 30 th	18	23,7
	36 – 45 th	18	23,7
	46 – 55 th	16	21,1
	> 55 th	3	3,9
Tingkat Pendidikan	SD/Tidak Tamat SD	16	21,1
	SLTP	10	13,2
	SLTA	30	39,5
	D III	4	5,3
	S1	16	21,1
	Jumlah	76	100,0

Sumber: Hasil analisis data lapangan, 2018.

Hasil uji deskriptif menunjukkan bahwa 15 item program pembangunan infrastruktur dasar termasuk dalam kategori paling tinggi adalah ketersediaan jaringan teknologi informasi dan komunikasi (Hp dan internet) (mean=4,60), menyediakan air layak minum (mean=4,57) dan perbaikan jalan yang rusak dan berlubang (mean=4,56) (Lihat Tabel 2).

Tabel 2. Program Pembangunan Infrastruktur Dasar Sesuai Kebutuhan Masyarakat Miskin Pedesaan

Item	Program Pembangunan Infrastruktur Dasar	Mean	Interpretasi
BFU1	Menyediakan air layak minum	4,57	Tinggi
BFU2	Pembangunan jembatan beton pengganti jembatan kayu	4,02	Tinggi
BFU3	Menyediakan air untuk keperluan pengairan (pertanian)	4,34	Tinggi
BFU4	Ketersediaan air untuk keperluan mandi dan mencuci pakaian	4,18	Tinggi
BFU5	Perbaikan jalan yang rusak dan berlubang	4,56	Tinggi
BFU6	Semenisasi jalan desa/dusun	4,48	Tinggi
BFU7	Membuka jalan baru menuju kawasan perkebunan masyarakat	4,48	Tinggi
BFU8	Ketersediaan listrik (PLN/PLTD)	4,32	Tinggi
BFU9	Menambah sarana transportasi darat	3,89	Tinggi
BFU10	Menambah sarana transportasi sungai	3,69	Tinggi
BFU11	Pembangunan dan Perbaikan Pasar Desa	3,93	Tinggi
BFU12	Pembangunan dan perbaikan Balai Pertemuan	4,34	Tinggi
BFU13	Ketersediaan jaringan teknologi informasi dan komunikasi (Hp dan internet)	4,60	Tinggi
BFU14	Membangun drainase di kawasan rawan banjir	4,22	Tinggi
BFU15	Membangun tanggul Sungai untuk mencegah abrasi tebing sungai	4,10	Tinggi

Sumber: Hasil analisis data lapangan, 2018.

Sedangkan penyediaan sarana transportasi darat (mean=3,89), sarana transportasi sungai (mean=3,69) dan Pembangunan dan Perbaikan Pasar Desa (3,93) adalah yang paling rendah dibutuhkan oleh masyarakat pedesaan (Diagram 2).

Diagram 2. Program Pembangunan Infrastruktur Dasar Sesuai Kebutuhan



Hasil kajian menunjukkan bahwa ternyata keadaan masyarakat sudah berubah berdasarkan kebutuhan mereka terhadap ketersediaan jaringan teknologi informasi dan komunikasi (Hp dan internet). Bukan hanya masyarakat kota yang memerlukan kemudahan dalam menggunakan alat komunikasi.

Internet (*interconnection-networking*) adalah seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem global *Transmission Control Protocol* (TCP) sebagai protokol pertukaran paket untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Rangkaian internet yang terbesar dinamakan Internet. Cara menghubungkan rangkaian dengan pola ini dinamakan *internetworking*. Mungkin dulu internet adalah merupakan sarana pelengkap atau hiburan semata, tapi sekarang kedudukan internet telah berubah yaitu telah menjadi sebuah kebutuhan bagi setiap orang, termasuk masyarakat desa.

Mengingat bahwa akses terhadap air merupakan hak dasar bagi manusia maka, penyediaan air minum bukan saja menjadi agenda nasional, namun juga menjadi agenda dunia, dengan dicanangkannya deklarasi Millenium Development Goals (MDGs). Target MDGs bidang air minum tahun 2015 yakni persentase rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak pedesaan sebesar 65,81% dan untuk perkotaan sebesar 75,29% atau rata-rata 68,87% (Anonim, 2010). Disebutkan pula pada laporan tersebut bahwa, tantangan berat pencapaian target MDGs sektor air minum meliputi kuantitas, kualitas, kontinuitas, aspek pendanaan yang meliputi sumber dana, struktur tarif dan keterjangkauan, pelayanan kaum miskin, manajemen, dan kelembagaan.

Eksplotasi berlebihan terhadap air tanah tidak hanya menyebabkan pengurangan ketersediaan air tetapi juga berakibat bagi penurunan kualitas air (Malik dan Shimi, 2014), dan menyebabkan terjadi intrusi air asin ke dalam air tawar (Nasjono, 2010). Sehubungan dengan hal tersebut maka, upaya yang lebih efisien dari pengelolaan sumber daya air yang tersedia mutlak diperlukan (Arwin, 2009), termasuk melaksanakan program konservasi dan penekanan pada pengurangan pemakaian air perkotaan (Devitt dan Morris, 2010). Penyediaan air minum juga dipengaruhi oleh banyak faktor termasuk pola konsumsi masyarakat yang dipengaruhi oleh keadaan sosial, budaya dan ekonomi (Kim dkk., 2007). Strategi pemenuhan kebutuhan air minum di daerah yang memiliki keterbatasan kapasitas sumber air, dapat dilakukan dengan cara meminimalisir

penggunaan air domestik (rumah tangga) yang boros dengan fasilitas publik yang dapat dimanfaatkan bersama (Halper dkk: 2000).

Kajian pemenuhan kebutuhan air minum dalam penelitian ini dibatasi pada lingkup identifikasi potensi sumber air baku yang tersedia, dan skenario pemenuhan kebutuhan air minum. Identifikasi potensi sumber air baku dalam penelitian ini akan didasarkan pada potensi dari sumber air tanah, air permukaan dan pemanfaatan potensi air hujan dengan pembuatan waduk. Potensi sumber air baku melalui proses desalinasi, daur ulang dan sumber lainnya tidak turut diperhitungkan. Penelitian oleh Zaghoul dan Al-Mutairi (2010) menyebutkan bahwa, masyarakat perkotaan di Kuwait lebih menunjukkan dukungan penggunaan air dari potensi air hujan yang ada dibandingkan dengan air limbah.

Satu lagi yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat desa adalah perbaikan jalan yang rusak. Akses jalan merupakan kunci utama mempercepat proses kemajuan masyarakat desa. Mereka perlu jalan yang bagus untuk membawa hasil pertanian ke pasar. Jika kondisi jalan rusak maka biaya pengangkutan hasil pertanian akan menjadi besar sehingga keuntungan petani akan semakin berkurang.

SIMPULAN

Kesuksesan program pembangunan sangat ditentukan oleh kesesuaian program dengan apa yang diperlukan oleh masyarakat desa. Program pembangunan infrastruktur dasar termasuk dalam kategori paling tinggi adalah ketersediaan jaringan teknologi informasi dan komunikasi (Hp dan internet), menyediakan air layak minum dan perbaikan jalan yang rusak dan berlubang. Jangan sampai pihak pemerintah hanya sekedar untuk menghabiskan anggaran pembangunan tetapi hasilnya kurang bermanfaat bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2014. *Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019*. Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Jakarta.
- Arwin, 2009. *Perubahan Iklim, Konversi Lahan dan Ancaman Banjir dan Kekeringan di Kawasan Terbangun*.
- Batten, T.R. 1957. *Communities and Their Development*. London: Oxford University Press.

- Cristian, H. (2015). Studi tentang Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) Tahun 2013 di Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara. *Kutai: eJournal Pemerintahan Integratif*, 3, 2337-8670.
- Eko, Sutoro, Dyah, Widuri, Suci Handayani, Uswantun Hasanah, Ninik Handayani, Fuji Komariah, Hasto Wiyono & Suharyanto. 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: FPPD bekerjasama dengan ACCESS Phase II-AusAID.
- Hillery, G. A. 1955. *Defenitions Of Community: Areas Of Agreement*, Rural Sociology, 20.
- Ilosa, A., Al Sukri, S., & Rudiadi, R. (2021). Asas Transparansi dalam Proses Pengangkatan Perangkat Nagari. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummanioramania*, 5(1), 71-83.
- Liando, L. Y., Lambey, L., & Wokas, H. R. (2017). Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 5(2).
- Malik, N., dan Simi, N.S., 2014. *Effect of Urbanization on Groundwater Quality in the Gafsa Town South Western Tunisia*. Desalination and Water Treatment.
- Mamud, Bustani Dj. 1995. *Studying Public Policy*, Oxford University Press, New York Toronto.
- Mowforth, M dan Munt, I. 1998. *Tourism and Sustainability: New Tourism in the Third World*. London: Routledge
- Mukerji, B. 1961. *Community Development In India*. Calcutta: Orient Logmans.
- Rudiadi, R., Ilosa, A., & Al Sukri, S. (2021). Optimalisasi Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa. *Jurnal EL-RIYASAH*, 12(1), 44-58.
- Setty, E. D. 1994. *Participatory Rural Development in Asia. A Critical Analysis*. New Delhi: Inter-India Publications.
- Syahrani, Legono, D., dan Nurrochmad, F., 2004. *Analisis Peranserta Masyarakat Dalam Pengelolaan Air Bersih*. Jurnal Manusia.

-
- Tamam Achda. 2004. *Mendahulukan Yang Tertinggal (2), Laporan Studi Penjajakan Kebutuhan Program Adopsi Desa Miskin di Jawa Barat*. Jakarta: Penerbit Pusat Pemberdayaan Masyarakat (Center For Social Empowerment) Universitas Nasional.
- Widodo, Joko. 2003. *Modul Teori Administrasi Negara*. Program Pasca Sarjana Untag: Surabaya.
- Zaghloul, N.A., dan Al-Mutairi, B.L., 2010. *Water Harvesting of Urban Runoff in Kuwait*. Scientia Iranica